

Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel

Felix Broson Manurung

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Krisman Heriamsal

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejumlah langkah diplomatik Indonesia untuk mengupayakan perdamaian dalam konflik terbaru Hamas dan Israel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan langkah-langkah diplomatik untuk mengupayakan perdamaian di Gaza melalui komunikasi dan interaksi dalam forum-forum internasional, shuttle diplomacy, diplomasi multilateral, dan diplomasi kemanusiaan. Meskipun Konflik di Gaza masih terus berlangsung, namun upaya-upaya diplomasi yang terus dilakukan Indonesia turut berkontribusi positif dalam mendorong upaya perdamaian di Timur Tengah, termasuk upaya gencatan senjata di Gaza.

Kata kunci: Diplomasi, Indonesia, Konflik, Hamas, Israel, Gaza.

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji langkah diplomatik Indonesia dalam mengupayakan perdamaian dalam konflik terbaru antara Israel dan Hamas di Palestina. Indonesia adalah negara yang paling konsisten mendukung Palestina untuk merdeka dan bebas dari pendudukan Israel. Selain itu, mengkaji langkah diplomatik Indonesia dalam konflik Hamas- Israel juga penting agar memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kebijakan luar negeri Indonesia, strategi diplomasi, dan peran Indonesia dalam dinamika konflik Hamas-

Israel. Temuan penelitian ini akan bersifat rekomendasi dan saran kebijakan bagi pemerintah Indonesia dalam memperbaiki atau meningkatkan strategi diplomasi Indonesia di Timur Tengah, khususnya dalam mengupayakan perdamaian dalam konflik Hamas dan Israel.

Konflik terbaru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik Hamas-Israel yang dimulai pada 7 Oktober 2023 yang masih berlangsung hingga saat ini. Konflik Hamas-Israel telah berlangsung lebih dari enam bulan. Eskalasi konflik yang signifikan telah menyebabkan jumlah korban

meningkat secara signifikan, dengan 33.899 warga Palestina dilaporkan tewas hingga tanggal 17 April 2024 sebagai hasil dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan Israel ke jalur Gaza (Reuters, 2024). Israel juga melibatkan serangan terhadap fasilitas umum di wilayah Gaza seperti Rumah Rakit, dimana infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan dalam situasi krisis kemanusiaan di Gaza (Muhamad, 2024).

Krisis Kemanusiaan di Gaza akibat konflik Hamas-Israel menarik perhatian dunia internasional. Banyak negara yang mengutuk serangan Israel ke Gaza, dan menyuatkan gencatan senjata segera dilakukan, termasuk Indonesia, yang selama ini sangat konsisten memberikan dukungan terhadap Palestina. Bahkan sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia secara konsisten menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Hal itu ditunjukkan melalui langkah-langkah konkret untuk mendukung Palestina, termasuk bantuan kemanusiaan, pengembangan ekonomi, pendidikan, dan dukungan politik, yang sering disuarakan dalam forum-forum Internasional (Nugraha and Maura, 2023).

Dukungan Indonesia terus ditunjukkan dalam konteks konflik terbaru Hamas-Israel di Jalur Gaza. Indonesia secara aktif mengupayakan perdamaian antara Hamas dan Israel agar mengakhiri krisis

kemanusiaan di Gaza. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk menunjukkan upaya perdamaian antara Hamas dan Israel adalah melalui berbagai metode diplomasi, yang bukan hanya melibatkan lembaga pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat Indonesia melalui berbagai aksi kemanusiaan. Konsistensi ini membuat Indonesia pada 2 April 2024, mendapatkan penghargaan dari negara-negara Arab karena selama ini Indonesia terus berkomitmen dan konsisten mendukung perjuangan Palestina (Kementerian Luar Negeri, 2024).

Karena konflik Hamas-Israel yang dimulai pada bulan Oktober 2023 masih relatif baru, penelitian yang spesifik yang membahas konflik terbaru tersebut masih terbilang terbatas. Namun, ada beberapa literatur yang menarik untuk diperhatikan terkait dengan isu ini. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Tian Adhia Nugraha dan Audry Maura yang berjudul *Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi 'Keamanan Manusia' di Palestina*. Kedua penulis mengajukan pertanyaan penelitian "Apa tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konflik Palestina-Israel?" dan "Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mempromosikan 'keamanan manusia' individu ataupun masyarakat Palestina?" Nugraha dan Maura berargumen bahwa terdapat urgensi

perubahan pandangan dari keamanan negara ke keamanan manusia dalam upaya Indonesia mempromosikan keamanan manusia di wilayah Palestina. Mereka juga menekankan bahwa keamanan manusia individu dan masyarakat Palestina sedang mengalami titik krisis selama bertahun-tahun (Nugraha and Maura, 2023).

Dalam penelitiannya, Nugraha dan Maura menggunakan konsep politik luar negeri dan konsep keamanan manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konflik Hamas-Israel adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Palestina yang sedang menghadapi krisis kemanusiaan. Dalam konteks ini, Indonesia menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari fokus pada keamanan negara menuju keamanan manusia ditekankan untuk menjamin bahwa prioritas utama adalah kesejahteraan manusia. Saat ini, ada kesenjangan antara perhatian yang diberikan pada keamanan negara dan kebutuhan manusia yang terdampak oleh konflik militer. Oleh karena itu, Indonesia telah mengadopsi pendekatan keamanan manusia untuk memfokuskan perhatian pada mereka yang terdampak krisis kemanusiaan, dengan langkah-langkah diplomatik dan ekonomi, termasuk dukungan pada forum internasional dalam menangani

konflik antara Hamas dan Israel (Nugraha and Maura, 2023).

Penelitian ini menyajikan analisis yang mendalam mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia terkait konflik Palestina-Israel, termasuk upaya pemerintah Indonesia dalam mempromosikan keamanan manusia di Palestina dari tahun 2014 hingga 2023. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode dan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Tetapi, Nugraha dan Naura sepertinya tidak memberikan analisis mengenai dampak atau efektivitas dari upaya politik luar negeri Indonesia tersebut.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Simela Victor Muhamad. Salah satu penelitiannya berjudul *Konflik Gaza Dan Diplomasi Indonesia Terkait Palestina*. Dalam penelitiannya, Muhamad ingin mengevaluasi pentingnya masyarakat internasional, termasuk Indonesia, dalam menghentikan konflik Gaza dan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi. Dikatakannya bahwa konflik Gaza yang masih berlanjut menimbulkan keprihatinan di tingkat internasional, dan masyarakat internasional perlu terus berupaya untuk mengakhiri konflik tersebut dengan menggunakan diplomasi (Muhamad, 2024).

Analisis yang ditunjukkan Muhamad dalam penelitiannya menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah konkret dan koordinatif dari berbagai pihak, termasuk negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) dan lembaga parlemen seperti DPR RI untuk mengatasi konflik Hamas-Israel. Tindakan-tindakan ini mencakup dorongan untuk menghentikan konflik di Gaza, memperjuangkan perdamaian antara Palestina-Israel melalui solusi dua negara, serta memperjuangkan pengakuan kedaulatan Palestina oleh komunitas internasional. Diplomasi juga harus menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai pendukung kemerdekaan Palestina dan memperkuat peran Indonesia dalam mempromosikan isu Palestina di tingkat internasional (Muhamad, 2024).

Penelitian Muhamad memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konflik Gaza dan diplomasi Indonesia terkait Palestina dengan menyajikan data dan fakta yang relevan mengenai jumlah korban dan kehancuran akibat konflik Gaza. Muhamad juga menyampaikan upaya diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui forum internasional dan parlemen. Tetapi, penelitian Muhamad tidak menyajikan perspektif dari pihak Israel atau sumber yang mewakili pandangan yang berbeda terkait konflik Gaza. Penelitiannya tidak memberikan analisis mendalam

mengenai dampak konflik Gaza terhadap stabilitas kawasan dan hubungan internasional, serta tidak menyajikan analisis mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam diplomasi Indonesia.

Berdasarkan sejumlah literatur yang telah dijelaskan, terdapat kecenderungan yang konsisten terkait dukungan Indonesia terhadap Palestina melalui upaya diplomasi. Namun, dalam berbagai penelitian akademis yang telah dilakukan, masih ada aspek-aspek tertentu yang belum diteliti secara menyeluruh, yaitu pendekatan-pendekatan lain yang digunakan Indonesia dalam menunjukkan dukungannya terhadap palestina khususnya melalui berbagai strategi diplomasi. Kesenjangan penelitian ini memiliki relevansi yang penting dan perlu dikaji secara lebih lanjut. Maka, dalam mengkaji upaya diplomasi Indonesia dalam konflik Hamas dan Israel, penelitian ini akan mengkaji terkait langkah-langkah diplomatik yang digunakan Indonesia, dengan menggunakan konsep diplomasi, yang belum pernah dibahas dan digunakan pada publikasi sebelumnya.

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori realisme, teori institusionalisme, dan juga konsep diplomasi untuk menganalisis diplomasi Indonesia dalam konflik Hamas-Israel. Sejumlah

asumsi dasar maupun dimensi dalam teori realis, sangat relevan dalam mengkaji tantangan dan peluang diplomasi Indonesia dalam konflik tersebut. Terdapat definisi mengenai realisme yang dikemukakan oleh para ahli. William Wohlforth dan Jack Donnelly menyebutkan bahwa realisme sebagai sebuah teori yang berakar pada kelompokisme (politik terjadi di dalam dan di antara kelompok-kelompok), egoisme (ketika individu-individu dan kelompok-kelompok bertindak secara politis, mereka terutama didorong oleh kepentingan pribadi yang sempit), dan anarki (ketiadaan pemerintahan internasional). Senada dengan itu, Robert Gilpin menyebutkan bahwa realisme adalah teori yang menjelaskan bahwa negara-negara melakukan interaksi termotivasi terutama oleh kepentingan nasional mereka. John Mearsheimer menyebutkan bahwa realisme menekankan pada sistem internasional bersifat anarkis. Negara-negara secara inheren memiliki kemampuan militer ofensif, yang memberikan mereka kemampuan untuk melukai dan mungkin menghancurkan satu sama lain. Tidak ada negara yang dapat memastikan bahwa negara lain tidak akan menggunakan kemampuan militer ofensifnya. Motif paling dasar yang mendorong negara adalah bertahan hidup. Negara-negara secara instrumental adalah rasional (Donnelly, 2022).

Beberapa asumsi dasar teori realisme di antaranya adalah bahwa negara merupakan aktor utama dalam politik internasional dan bertindak sebagai entitas rasional yang mengejar kepentingan nasionalnya. Walaupun keberadaan aktor non-negara diakui, peran mereka dianggap kurang signifikan. Menurut realisme, negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional. Selain itu, sistem internasional dianggap anarkis, yang berarti tidak ada otoritas pusat yang mengatur hubungan antarnegara. Dalam kondisi anarki, negara-negara harus melindungi kepentingannya, di mana realisme berpendapat bahwa kekuasaan, terutama kekuatan militer, adalah alat utama untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional. Oleh karena itu, negara-negara berusaha memaksimalkan kekuatan mereka untuk mengamankan posisi dalam sistem internasional. Karena itu, konflik dan perang dianggap sebagai fenomena yang tak terhindarkan dalam hubungan internasional. Negara-negara harus selalu siap menghadapi ancaman dan konflik demi melindungi kepentingannya. Bagi realisme, pemimpin negara harus bersikap pragmatis dan realistis, siap mengambil tindakan yang mungkin tidak bermoral demi kepentingan nasional. Singkatnya, realisme menekankan pentingnya kekuasaan, kepentingan nasional, dan sifat dasar manusia dalam

memahami dinamika hubungan internasional (Donnelly, 2022).

Penulis juga menggunakan teori institusionalisme untuk menganalisis diplomasi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dan gencatan senjata dalam konflik Hamas-Israel. Beberapa dimensi seperti, peran institusi, norma, aturan, dan nilai-nilai, membuat teori institusionalisme relevan dalam isu yang dikaji. Salah satu hal yang menjadi penekanan dalam institusionalisme adalah pentingnya norma, aturan, dan nilai-nilai dalam mempengaruhi dan membentuk perilaku politik dan kebijakan internasional. Dalam konteks ini, institusionalisme memperhatikan peran norma-norma dalam membentuk perilaku negara dalam hubungan internasional. Melalui analisis norma-norma ini, maka dapat dipahami bagaimana kepatuhan atau pelanggaran terhadap norma-norma dapat mempengaruhi reputasi dan diplomasi suatu negara. Menurut pendekatan institusionalisme, institusi memiliki peran yang signifikan dalam membentuk hasil politik. Institusi memengaruhi keputusan politik, termasuk keputusan untuk bekerja sama atau tidak, serta jenis kerjasama yang terbentuk (Haastrup, 2022)

Institusionalisme memiliki beberapa asumsi dasar. Pertama, institusionalisme meyakini bahwa institusi memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik

dan proses kebijakan. Institusi dianggap sebagai struktur yang mempengaruhi interaksi antara aktor politik dan menyediakan kerangka kerja untuk tindakan politik. Kedua, menurut institusionalisme, institusi menciptakan norma, aturan, dan prosedur yang mengatur perilaku aktor politik. Norma-norma ini dapat menjadi panduan bagi tindakan politik dan memengaruhi preferensi serta keputusan politik. Selanjutnya, hubungan antara aktor politik dan institusi dianggap saling mempengaruhi. Aktor politik dapat membentuk, mempertahankan, atau mengubah institusi, sementara institusi dapat membatasi atau memfasilitasi tindakan aktor politik. Terakhir, institusionalisme menekankan bahwa institusi tidak berdiri sendiri, tetapi berintegrasi dalam konteks sosial yang lebih luas. Faktor-faktor seperti budaya, nilai, dan kekuasaan juga mempengaruhi dinamika institusi dan interaksi politik (Haastrup, 2022).

Selanjutnya, dalam mendefinisikan diplomasi, Berridge mendefinisikan diplomasi sebagai suatu proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara negara-negara atau aktor-aktor internasional lainnya dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional atau tujuan bersama. Berridge menyoroti bahwa diplomasi tidak hanya terbatas pada negosiasi formal antara

pemerintah, tetapi juga mencakup berbagai bentuk komunikasi dan interaksi, termasuk diplomasi publik, diplomasi budaya, dan diplomasi ekonomi. Menurut Berridge, diplomasi juga melibatkan penggunaan berbagai instrumen kekuasaan, termasuk kekuatan militer, ekonomi, dan politik, serta kemampuan untuk mempengaruhi persepsi dan opini publik. Selain itu, Berridge menekankan pentingnya diplomasi sebagai alat untuk mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian serta kerja sama internasional. Singkatnya, konsep diplomasi menurut Berridge terletak pada pentingnya komunikasi, negosiasi, dan interaksi antara aktor-aktor internasional untuk mencapai tujuan-tujuan politik, ekonomi, dan keamanan (Berridge, 2022).

Selain itu, dalam bukunya yang berjudul *A Dictionary of Diplomacy*, Berridge dan James menyebutkan bahwa diplomasi adalah seni dan praktik memfasilitasi hubungan antara negara-negara. Ini melibatkan penggunaan keterampilan diplomatik dan teknik negosiasi untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. Diplomasi juga mencakup pemeliharaan perdamaian, penyelesaian konflik, promosi perdagangan dan investasi, serta kerja sama internasional dalam berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, dan keamanan (Berridge and James, 2003).

Sejalan dengan itu, Menurut Anderson, diplomasi adalah proses yang melibatkan negosiasi, perundingan, dan komunikasi antara negara-negara, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian masalah yang muncul di antara mereka. Ini mencakup pertukaran informasi, pertimbangan kepentingan bersama, dan kadang-kadang penggunaan tekanan atau ancaman untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, diplomasi dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan interaksi antara negara-negara dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian atas masalah-masalah yang timbul di antara mereka. Proses ini mencakup berbagai aktivitas, seperti negosiasi, perundingan, dan komunikasi, serta dapat melibatkan pertukaran informasi dan pertimbangan kepentingan bersama (Anderson, 1993).

Suatu negara biasanya melakukan diplomasi berdasarkan apa yang terjadi di dunia internasional. Dalam situasi di mana negara-negara memiliki perbedaan dan tindakan mereka saling mempengaruhi, maka tidak mungkin bagi negara untuk bertindak bebas sesuai kepentingannya. Dalam situasi seperti itu, masing-masing negara hanya mempertimbangkan cara mengelola kepentingannya sendiri. Negara-negara tidak menikmati kebebasan sepenuhnya, melainkan bergantung satu

sama lain. Negara-negara yang menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada sistem internasional mempengaruhi kebijakan domestik akan cenderung merasa harus berdialog satu sama lain, dan ini adalah salah satu aspek penting dari praktik diplomasi, yaitu pembicaraan atau hubungan yang dijalin antara negara-negara ini (Watson, 1982).

Terdapat empat prinsip utama dalam diplomasi yaitu *negotiation, communication, building relationship, and promoting interest*. *Negotiations* adalah aspek fundamental dari diplomatik, yang meliputi percakapan dan tawar-menawar untuk mencapai resolusi yang disepakati bersama. *Communications* sangat penting dalam diplomasi karena memungkinkan pertukaran ide, sudut pandang, dan informasi antar negara. Komunikasi yang efisien menumbuhkan pemahaman, mengurangi salah tafsir, dan memupuk kepercayaan. *Building relationship* adalah prinsip penting dalam diplomasi, dengan fokus membina hubungan baik dan kepercayaan antar negara. Dengan membina hubungan baik, diplomasi dapat menghasilkan kolaborasi yang lebih baik, mempercepat dialog, dan mendorong stabilitas. Memajukan kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan negara lain merupakan prinsip utama diplomasi yang dikenal sebagai *promoting interest*. Para negosiator

berusaha untuk mencapai keseimbangan dengan secara simultan mengejar tujuan mereka sendiri dan mencari hasil yang saling menguntungkan melalui kompromi. Secara keseluruhan, empat prinsip utama diplomasi ini membentuk fondasi untuk praktik diplomatik yang efektif. Prinsip-prinsip ini saling terkait dan bekerja sama untuk memfasilitasi keterlibatan diplomatik yang sukses (Saaida, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini mengandalkan pada pencarian bukti-bukti yang bersifat non-numerik (Mahoney and Goerts, 2006). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan cara mempelajari, menganalisis, dan menelaah literatur yang sesuai dengan penelitian ini, yang bersumber dari bersumber dari buku, e-book, jurnal, dokumen, dan media daring. Selain itu, kami mengumpulkan bukti dan data dari situs resmi pemerintah Indonesia, termasuk kanal youtube resmi instansi terkait. Hal ini dilakukan untuk lebih memastikan dan memperkuat data-data terkait diplomasi Indonesia dalam konflik terbaru Hamas-Israel.

PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan masalah tulisan ini tentang bagaimana langkah-langkah diplomatik Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dalam konflik terbaru Hamas-Israel, maka pada bagian ini akan dibagi kedalam beberapa poin penting. Pertama akan dijelaskan terkait gambaran konflik terbaru Hamas-Israel. Pada bagian kedua akan dijelaskan langkah diplomatik Indonesia dalam mengupayakan perdamaian antara Hamas dan Israel.

Gambaran Konflik Terbaru Hamas-Israel

Konflik terbaru Hamas-Israel telah berlangsung lebih dari enam bulan. Konflik ini diawali oleh serangan ribuan roket kelompok Hamas dari Gaza ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan itu mengakibatkan sekitar 1.200 warga sipil Israel tewas, dan ada sekitar 240 orang yang disandera yang didalamnya mencakup anak-anak, pria, wanita, dan tentara Israel. Serangan Hamas tersebut kemudian diikuti dengan respons militer Israel yang menargetkan infrastruktur dan kepemimpinan Hamas (Bochtler, 2024). Konflik ini sebenarnya berakar pada perselisihan politik dan teritorial yang telah berlangsung lama antara Israel dan Palestina, terutama mengenai status wilayah Yerusalem, kewarganegaraan Palestina, dan blokade di jalur Gaza. Situasinya sangat kompleks, ditandai dengan siklus kekerasan,

perjanjian gencatan senjata, dan eskalasi sporadis.

Serangan balasan Israel yang awalnya hanya menargetkan infrastruktur kelompok Hamas kemudian merambat ke hampir seluruh wilayah Gaza, dan membuat warga sipil menjadi sasaran serangan mereka. Sebelum serangan balasan tersebut, Israel memerintahkan sekitar satu juta warga sipil di Gaza untuk mengungsi ke bagian selatan sebelum invasi darat Israel. Pada saat itu ada tekanan dari PBB agar Israel menurunkan niatnya menyerang, namun Israel tetap melanjutkan serangannya ke Jalur Gaza. Selama sekitar satu minggu, Israel menghancurkan sebagian besar Gaza, dan telah mengakibatkan sekitar 1.900 kematian (Debre et al. 2023).

Hingga pada 18 April 2024 telah ada sekitar 33.970 warga Palestina yang meninggal akibat serangan Israel ke Palestina (Pietromarchi et al., 2024). Selain angka kematian yang meningkat signifikan, Masalah lainnya di Jalur Gaza adalah meningkatnya angka kelaparan yang cukup signifikan. Sebelumnya *Food and Agriculture Organization (FAO)* telah memperkirakan risiko kelaparan akan muncul dalam waktu enam bulan jika konflik antara Hamas dan Israel terus berlanjut (Integrated Food Security Phase Classification, 2023). Hal ini benar-benar terjadi, per tanggal 5 April 2024, terdapat sekitar 1,5 juta orang yang

menderita kelaparan di wilayah Rafah, sementara itu, di Wilayah Utara Gaza juga menghadapi masalah yang sama. Secara keseluruhan ada sekitar 2,2 juta penduduk yang mengalami krisis pangan yang parah (British Red Cross, 2024).

Serangan Israel ke Gaza yang telah memicu krisis kemanusiaan terburuk, juga diperparah oleh ketidakterediaan fasilitas rumah sakit yang memadai, karena Israel juga melibatkan serangan pada fasilitas-fasilitas umum termasuk rumah sakit. Pada November 2023, militer Israel menghancurkan Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, bahkan sekitar 30.000 orang terjebak dalam rumah sakit tersebut ketika diserang oleh Israel (Aljazeera, 2024). Selain itu, Israel juga melakukan serangan ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara, dimana rumah sakit tersebut adalah salah satu tempat penampungan orang-orang yang terdampak serangan Israel (Ranggasari, 2023). Atas serangan Israel ke Gaza, ada sekitar 85% dari 2,2 juta penduduk Gaza harus mengungsi ke tempat yang aman (UNRWA, 2023).

Kemarahan global telah meningkat saat menyaksikan krisis kemanusiaan di Gaza, dan meningkatnya korban jiwa secara signifikan. Dunia internasional merespons dan menyerukan gencatan senjata segera dilakukan. Selain itu, banyak pemimpin negara-negara yang mengajukan seruan

untuk melakukan gencatan senjata segera. PBB sendiri bahkan telah mengadakan pertemuan darurat dan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, secara konsisten menyerukan gencatan senjata guna melindungi warga sipil serta memudahkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza (Bochtler, 2024).

Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga telah menunjukkan upaya menyelesaikan konflik dengan merumuskan beberapa resolusi gencatan senjata. Tetapi, hal itu mendapat tekanan dari anggota tetap dewan keamanan PBB dan sekutunya, yang memiliki persepsi yang berbeda terkait resolusi yang ada. Hal ini ditandai dengan penolakan RRT dan Rusia terhadap rancangan resolusi yang diloloskan oleh Dewan Keamanan PBB, yang diajukan oleh Amerika Serikat. Kedua negara tersebut menolak karena resolusi tersebut tidak menyerukan gencatan senjata melainkan hanya sekedar jeda kemanusiaan saja supaya bantuan kemanusiaan dapat masuk ke jalur Gaza dengan lancar (Nichols, 2023).

Hal ini juga dilakukan oleh negara Amerika Serikat terhadap resolusi yang diajukan oleh Rusia. Resolusi gencatan senjata tersebut gagal disahkan karena ditolak Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jepang. Alasannya karena resolusi itu kurang tegas dalam mengecam kelompok Hamas yang telah mengawali serangan

terburuk yang pernah dilakukan ke Israel, dimana kelompok Hamas selama ini mereka labeli sebagai kelompok teroris (Lederer, 2023). Sampai pada 26 Oktober 2023, Dewan Keamanan PBB telah gagal mengesahkan empat rancangan resolusi karena penolakan dari anggota Dewan keamanan PBB, khususnya anggota tetap (Salim, 2023).

Eskalasi konflik yang signifikan di Jalur Gaza, membuat Afrika Selatan mengambil inisiatif untuk mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional bahwa Israel telah melakukan kejahatan genosida di Gaza. Afrika Selatan menganggap bahwa tindakan Israel yang tidak terkontrol di Gaza telah mengarah pada Genosida. Oleh karena itu, Mahkamah Internasional perlu mengambil langkah untuk menghentikan kejahatan yang melanggar hukum internasional tersebut. Afrika Selatan dan Israel adalah dua negara yang turut menandatangani konvensi PBB tentang kejahatan Genosida (Bartlett, 2024). Namun, Mahkamah Internasional tidak memerintahkan gencatan senjata seperti yang diminta oleh Afrika Selatan. Sebaliknya, lembaga tersebut hanya menetapkan serangkaian langkah yang harus diambil oleh Israel, seperti meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai upaya genosida (UK Parliament, 2024).

Pada 21 Februari 2024, Amerika Serikat memveto resolusi gencatan senjata dalam konflik Hamas-Israel yang diajukan oleh Aljazair. Veto tersebut adalah veto ketiga Amerika yang selalu menghalangi upaya gencatan senjata di Jalur Gaza (Christiastuti, 2024). Selanjutnya, pada 25 Maret 2024, untuk pertama kalinya sejak perang terbaru Hamas-Israel, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera selama bulan Ramadhan, pembebasan sandera tanpa syarat, dan peningkatan bantuan ke Gaza. Dalam momentum tersebut, Amerika Serikat memilih untuk tidak memberikan suara.

Namun, Alih-alih menghentikan serangan ke Jalur Gaza setelah gencatan senjata disepakati, pemerintah Israel justru menegaskan niatnya untuk memperluas operasi militer di Rafah, meskipun resolusi telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB yang mengikat terkait gencatan senjata segera. Tidak lama setelah resolusi gencatan senjata disetujui, militer Israel melancarkan serangan terhadap lebih dari 60 sasaran di Gaza, termasuk rumah sakit. Ini menunjukkan resolusi Dewan Keamanan PBB tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan Israel agar menghentikan pendudukan di wilayah Gaza (Amnesty Internasional, 2024).

Langkah Diplomatik Indonesia Untuk Mengupayakan Perdamaian

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Indonesia secara konsisten telah menunjukkan dukungan yang kuat terhadap Palestina dan telah aktif berusaha untuk mendorong perdamaian antara Israel dan Palestina. Sejak terjadi konflik terbaru Hamas-Israel, Indonesia telah terlibat secara aktif dalam upaya diplomasi untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak yang terlibat, terutama dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Gaza. Kami mengidentifikasi setidaknya ada lima langkah diplomatik yang dilakukan Indonesia dalam upayanya mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza, dan mengupayakan perdamaian.

Pertama, sebagaimana yang dikatakan Berridge bahwa diplomasi juga mencakup berbagai bentuk komunikasi dan interaksi, maka kami berargumen bahwa langkah diplomatik Indonesia untuk mengupayakan perdamaian adalah melalui komunikasi dan interaksi dalam pertemuan-pertemuan diplomatik, dan partisipasi dalam organisasi Internasional yang melibatkan interaksi dan komunikasi. Sebagai contoh, pada perhelatan KTT ASEAN-GCC di Riyadh Oktober 2023 yang lalu, Presiden Indonesia, Joko Widodo, melakukan diplomasi melalui komunikasi dan pernyataan yang dengan tegas mengutuk

tindakan kekerasan Israel di Gaza dan menekankan perlunya menghentikan kekerasan tersebut. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa isu kemanusiaan harus menjadi fokus utama saat ini. Dalam konteks ini, ASEAN dan GCC diharapkan dapat bekerja sama untuk mencegah situasi yang semakin memburuk dan tidak melupakan bahwa sumber masalahnya adalah pendudukan wilayah Palestina oleh Israel (BPMI Setpres, 2023).

Selain itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi juga secara konsisten mengadvokasi gencatan senjata di Gaza dan bantuan kemanusiaan, baik dalam pertemuan para menteri luar negeri di Dewan Keamanan PBB maupun dalam sidang darurat Majelis Umum PBB yang membahas ketegangan antara Hamas dan Israel. Dalam pertemuan diplomatik peringatan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ke-75 tahun, yang dilakukan di markas besar Dewan HAM PBB Desember 2023, Retno Marsudi sekali lagi secara diplomatis mengutuk situasi di Gaza, Palestina, sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Retno Marsudi menggarisbawahi tiga hal yang perlu didorong bersama dengan negara-negara lain, yaitu gencatan senjata segera dan permanen, penolakan terhadap standar ganda, dan dukungan terhadap mekanisme akuntabilitas seperti Komisi Investigasi

Internasional yang independen (Chaterine and Krisiandi, 2023).

Contoh lainnya dalam langkah diplomatik ini adalah diplomasi Indonesia di forum Mahkamah Internasional. Pada 23 Februari 2024, Indonesia menyampaikan pernyataan lisan di Mahkamah Internasional, Indonesia menegaskan bahwasanya rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, yang diakui oleh hukum internasional. Indonesia menolak pendudukan Israel atas Palestina, mengutuk pembangunan permukiman ilegal Israel, bahkan menuduh Israel melakukan kebijakan apartheid dan menuntut penghentian pendudukan Israel, dan Israel harus memberi reparasi untuk Palestina, dan yang penting adalah mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza. Dalam diplomasi ini, Indonesia menekankan pentingnya hukum internasional, hak dasar warga Palestina, konsekuensi hukum atas tindakan ilegal Israel, dan mendesak penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza (Marsudi, 2024).

Pada 2024-2026, adalah periode keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB. Oleh karena itu, pada sidang dewan HAM 26 Februari 2024, Menlu RI menjadikan isu keadilan rakyat Palestina sebagai salah satu isu utama. Menlu RI melakukan upaya diplomasi dengan menggunakan forum Dewan HAM PBB ke-55 untuk memperjuangkan keadilan bagi

rakyat Palestina, menyoroti standar ganda dalam penegakan HAM global, dan menyerukan tindakan terhadap pelanggaran HAM di Gaza. Menlu RI mengusulkan tiga hal penting bagi Dewan HAM PBB, yaitu memperkuat ekosistem HAM, mengatasi krisis kemanusiaan secara global, dan memajukan HAM secara setara. Menlu Retno juga menyerukan agar negara-negara kembali komitmen pada penegakan HAM yang tidak selektif (Kementerian Luar Negeri, 2024).

Sebelumnya, pada 19 Februari 2024, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Nugraha Mansury, turut melakukan upaya yang sama pada KTT Gerakan Non-Blok (GNB) di Uganda. Wamenlu RI menyuarakan secara langsung bahwa semangat Konferensi Asia Afrika sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, kesetaraan, dan pembangunan bagi negara-negara berkembang, khususnya bagi Palestina. Dalam momentum tersebut Wamenlu RI mendesak solidaritas GNB untuk mendukung perdamaian dan keanggotaan penuh Palestina di PBB (Kementerian Luar Negeri, 2024).

Kedua, Indonesia melakukan langkah diplomatik melalui *shuttle diplomacy*. Ketika PBB atau Dewan Keamanan PBB gagal dalam mencapai gencatan senjata karena sejumlah penolakan dalam forum tersebut,

Indonesia melakukan *shuttle diplomacy* kepada semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sebagai Contoh, pada 13 November 2023, Joko Widodo, melakukan *shuttle diplomacy* ke Amerika Serikat (AS). Joko Widodo membawa agenda penting terkait konflik antara Hamas dan Israel. Pada pertemuannya dengan Presiden AS, Joko Widodo menekankan tiga hal penting. Pertama, pentingnya untuk mengakhiri kekerasan yang tengah berlangsung di Jalur Gaza. Kedua, diperlukan upaya untuk melakukan gencatan senjata secepat mungkin. Ketiga, perlunya menghentikan perang antara Hamas dan Israel, serta mempermudah bantuan kemanusiaan untuk dapat masuk ke Gaza (BBC News, 2023).

Indonesia juga melakukan *shuttle diplomacy* ke Tiongkok. Dalam konteks ini, Menteri Luar negeri Indonesia, berkunjung ke Tiongkok dengan tujuan mendorong negara anggota Dewan Keamanan PBB tersebut agar mendukung percepatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel, serta memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza. Dalam konteks ini, Indonesia mengharapkan Tiongkok untuk meningkatkan peranannya secara signifikan dalam forum Dewan Keamanan PBB untuk mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand dan Vietnam (Tian and Chen, 2023).

Selain itu, Indonesia juga melakukan kunjungan ke Rusia, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Menlu Retno Marsudi, melakukan *shuttle diplomacy* ke Rusia pada 21 November 2023. Tujuan utama dari Diplomasi ini adalah untuk mengutuk serangan militer Israel di Gaza Palestina, serta menegaskan perlunya langkah-langkah konkret untuk mengakhiri kekerasan di Gaza. Salah satu langkah yang diinginkan adalah segera menerapkan gencatan senjata dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke Gaza tanpa hambatan (Azzahra, 2023).

Pada 22 November 2023, Menlu RI melanjutkan kunjungannya ke Inggris. Dalam *shuttle diplomacy* ini, Indonesia kembali membahas kerja sama terkait situasi krisis di Gaza, secara khusus membahas tentang pentingnya segera menempuh langkah-langkah efektif oleh anggota Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional untuk mencapai gencatan senjata sepenuhnya di wilayah Gaza. Dalam konteks ini, Indonesia meminta Inggris untuk berperan secara seimbang sesuai hukum internasional maupun hukum kemanusiaan internasional, dengan tujuan mencapai gencatan senjata secepatnya dan menerapkan semua resolusi internasional yang relevan dalam konflik Hamas dan Israel (Arab News, 2023).

Kemudian, Menlu Retno Marsudi melakukan diplomasi dengan mengunjungi Prancis. Fokus dan tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dalam mencapai gencatan senjata di Gaza. Terutama karena Prancis juga merupakan salah satu negara yang ikut memveto resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan PBB pada Oktober 2023 lalu. Indonesia berharap Prancis, sebagai negara dengan pengaruh dan status sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dapat berperan dalam mengupayakan gencatan senjata (Purnama, 2023).

Ketiga, langkah diplomatik yang ditempuh Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dalam konflik terbaru Hamas-Israel adalah melalui diplomasi multilateral. Dalam konteks ini, Indonesia bekerja sama dengan beberapa negara dalam sebuah forum internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam menyelesaikan konflik antara Hamas dan Israel. Dalam diplomasi ini, Indonesia dan negara mitranya berpartisipasi dalam dialog dan perundingan guna menghasilkan solusi yang efektif bagi semua pihak yang terlibat. Langkah diplomatik ini dapat ditelaah pada keterlibatan Indonesia dalam beberapa Organisasi Internasional seperti PBB, ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Namun, dalam bahasan ini kami akan lebih berfokus pada

upaya diplomasi multilateral Indonesia melalui OKI.

Partisipasi Indonesia dalam OKI memungkinkan untuk melakukan diplomasi multilateral guna mendukung perdamaian di Gaza. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI di Arab Saudi, Indonesia mengambil inisiatif untuk menggalang solidaritas dan tindakan segera dalam menangani krisis di Palestina. Indonesia menegaskan pentingnya persatuan OKI dalam menangani konflik yang sedang berkecamuk di wilayah tersebut. Presiden Joko Widodo menekankan perlunya OKI bersatu dan aktif menggunakan berbagai cara damai, pengaruh, dan upaya diplomasi untuk mendukung keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Indonesia juga menyampaikan empat saran konkret kepada pemimpin OKI, termasuk desakan untuk gencatan senjata segera, percepatan bantuan kemanusiaan di Gaza, tuntutan pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan Israel, serta dorongan untuk memulai kembali perundingan damai demi mencapai solusi dua negara (BPMI Setpres, 2023).

Selain itu, Menlu RI menegaskan pentingnya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bertindak dalam menanggapi krisis di Palestina. Menlu RI juga mengkritik Dewan Keamanan PBB yang dianggap gagal menjalankan fungsinya, serta

mendorong OKI untuk mengupayakan sidang darurat Majelis Umum PBB. Terkait bantuan kemanusiaan, Indonesia mendesak OKI untuk membentuk koridor kemanusiaan di Gaza dan menentang usaha pengusiran penduduk. Tindakan ini mencerminkan upaya diplomasi Indonesia melalui kerja sama bilateral untuk memobilisasi dukungan dalam mencapai perdamaian (Mazrieva, 2023).

Pada pertemuan luar biasa para Menteri Luar Negeri OKI di Jeddah, Arab Saudi, Menlu Retno juga telah meminta OKI untuk menyampaikan pesan yang kuat dan mendapatkan dukungan global untuk menghentikan perang di Gaza. Indonesia mendesak OKI untuk mendorong semua pihak terlibat untuk mematuhi hukum humaniter internasional. Indonesia juga mendorong OKI untuk mendukung proses perdamaian Israel-Palestina yang sedang berlangsung dan mewujudkan solusi dua negara sebagai cara untuk mengatasi akar konflik. Menlu Retno menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak warga Palestina adalah kunci untuk mencapai perdamaian yang abadi dan menentang pendudukan Israel di wilayah Palestina (Difa and Adji, 2023).

Dengan organisasi OKI, Indonesia juga telah berhasil menggalang dukungan untuk sama-sama melakukan upaya *shuttle diplomacy* ke kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini ditandai dengan

adanya upaya bersama para menteri luar negeri negara anggota OKI untuk sama-sama berkunjung untuk menjalankan misi menggalang dukungan dari berbagai pihak.

Keempat, Indonesia menggunakan langkah diplomatik melalui diplomasi bilateral. Langkah ini melibatkan pertemuan, perundingan, dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan suatu negara untuk memajukan kepentingan bersama terkait keamanan internasional, atau penanggulangan krisis kemanusiaan di Gaza. Sebagai contoh, pada 11 November 2023, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Raja Yordania. Dalam diplomasi tersebut, Indonesia dengan tegas menyampaikan dukungannya terhadap upaya Raja Yordania dalam memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Kedua pemimpin menyoroti pentingnya solusi dua negara sebagai fondasi bagi kemerdekaan Palestina. Sebagai pelopor Resolusi Majelis Umum PBB mengenai isu Palestina, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap penyelesaian konflik tersebut (Kominfo, 2023).

Pada 14 Desember 2023, Indonesia dan Iran telah mengadakan pertemuan bilateral di Jenewa untuk membahas situasi di Gaza, Palestina, yang terus mengalami serangan dari Israel. Kedua negara sepakat tentang pentingnya gencatan senjata untuk

meningkatkan situasi di Gaza dan setuju untuk bekerja sama dalam membantu Palestina (Ibrahim, 2023). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dalam pertemuan bilateral dan sepakat untuk bekerja sama dalam penyelesaian masalah Gaza serta terus memberikan dukungan kepada perjuangan kemerdekaan Palestina. Mereka menyoroti pentingnya persatuan dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan mendesak agar terjadi gencatan senjata serta jeda kemanusiaan. Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan keadilan bagi Palestina melalui berbagai forum internasional (BPMI Setpres, 2023).

Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2023, Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Jepang, yaitu Fumio Kishida. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pemimpin membicarakan masalah yang terkait dengan Palestina. Presiden Jokowi khususnya menekankan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk terus berupaya mencapai gencatan senjata jangka panjang, mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan, dan mendorong dimulainya proses perdamaian melalui solusi dua negara secepat mungkin. Dimana Indonesia sangat mengharapkan dukungan

Jepang dalam upaya tersebut (BPMI Setpres, 2023).

Upaya lain dalam kerangka bilateral adalah pertemuan Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 31 Januari 2024, Indonesia dan Belanda mengadakan pertemuan bilateral di mana isu Palestina juga dibahas. Menlu RI menyoroti perlunya penyelidikan terbuka terhadap klaim Israel terhadap UNRWA, sementara pemerintah Belanda menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara (Pramudyani, 2024).

Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, juga melakukan upaya diplomasi bilateral. Wapres RI melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru pada 28 Februari 2024. Mereka membahas kerja sama antara kedua negara serta sikap politik terkait situasi di Palestina. Kedua belah pihak setuju untuk mendukung upaya mengakhiri perang di Palestina melalui perundingan dan gencatan senjata yang langgeng. Wakil Presiden juga mengajak Selandia Baru untuk membantu menggalang bantuan kemanusiaan bagi Palestina, mengingat situasi yang memprihatinkan di sana. Selain itu, mereka juga membahas upaya mempromosikan perdamaian dan toleransi antar umat manusia, mengingat adanya gangguan dan konflik di berbagai belahan dunia, termasuk di Rusia, Ukraina, dan Palestina (BPMI Setpres, 2024).

Di tengah kekhawatiran bersama terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah, Indonesia dan Tiongkok mengadakan pertemuan bilateral yang menegaskan kesamaan pandangan dan komitmen terkait pentingnya mencegah peningkatan eskalasi konflik di wilayah tersebut, khususnya dalam menyelesaikan pertikaian Israel-Palestina. Kedua negara sepakat bahwa penting untuk menahan diri dan mengurangi ketegangan dalam situasi di Timur Tengah, khususnya mengurangi agresi militer Israel di Jalur Gaza dengan mengadakan gencatan senjata. Kedua belah pihak juga sepakat bahwa penyelesaian konflik Israel-Palestina harus berlangsung secara adil melalui solusi dua negara, dengan Palestina diterima sebagai anggota penuh PBB (Ihsan, 2024).

Kelima, Indonesia menggunakan langkah diplomatik melalui diplomasi kemanusiaan. Dalam konteks ini, dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza, dan membantu korban serangan militer Israel, Indonesia melibatkan diplomasi melalui bantuan kemanusiaan. Hal ini ditandai dengan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina pada tanggal 3 April 2024. Tindakan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia dan terlibat dalam misi kemanusiaan secara global khususnya dalam mengupayakan perdamaian di jalur Gaza.

Bantuan senilai Rp30 miliar tersebut mencakup obat-obatan, peralatan kesehatan, dan jenis bantuan lainnya (Kementerian Luar Negeri, 2024).

Diplomasi Kemanusiaan Indonesia juga melibatkan partisipasi masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat lainnya merancang dan melaksanakan program-program kemanusiaan seperti mengadakan acara penggalangan dana, menyumbangkan secara langsung, atau mendukung kampanye penggalangan dana yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, dalam rangka menggalang dukungan dan donasi untuk rakyat Palestina, diaspora Indonesia di Turki menggelar acara "*Palestina Humanity Gathering*", yang di dalamnya dilakukan lelang novel karya Asma Nadia, yang hasilnya disumbangkan untuk Palestina (Anadolu Ajansı, 2024).

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menggalang dana untuk bantuan kemanusiaan bagi Palestina. Penggalangan dana yang dilakukan MUI berhasil mengumpulkan total sekitar Rp 27 miliar, termasuk dari berbagai sumber seperti individu, lembaga, masjid, kantor MUI daerah, sekolah, dan pihak lainnya (Azharun, 2023). Hal yang sama juga dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam

(YPI) Ar Rohmah Tahfizh Hidayatullah Malang dan Masyarakat Muslim Malang Raya Cinta Indonesia (MERCII). Pada Jumat, 20 Oktober 2023, organisasi masyarakat ini melakukan aksi solidaritas dan turut menggalang dana untuk membantu rakyat Palestina. Aksi solidaritas ini dipandang sebagai wujud diplomasi kemanusiaan Indonesia untuk mendukung Palestina (Nasional News, 2023).

Di Kota Sabang, diplomasi kemanusiaan Indonesia juga ditunjukkan melalui aksi solidaritas masyarakat Kota Sabang yang terdiri dari komunitas-komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), dan lembaga Islam di Kota Sabang, termasuk pemerintah daerah. Kegiatan solidaritas tersebut melibatkan penggalangan dana, dan mendukung perluasan penggalangan dana untuk membantu Palestina. Dana yang dikumpulkan kemudian disalurkan oleh Komite Nasional Rakyat untuk Palestina. (Sabangkota 2023). Hal yang sama juga dilakukan di Kota Tangerang, di mana masyarakatnya turut melakukan kegiatan kemanusiaan dengan menggalang dana melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga lainnya, dan mereka berhasil mengumpulkan sekitar 40 juta yang akan didonasikan untuk rakyat Palestina melalui bantuan kemanusiaan (Pemerintah Kota Tangerang, 2023).

Diplomasi kemanusiaan Indonesia juga dapat dilihat dari aksi mahasiswa Institut Saptia (ITS) Mandiri Kabupaten Balangan yang mengadakan aksi solidaritas dan penggalangan dana untuk mendukung masyarakat Palestina yang tengah mengalami konflik, pada 14 November 2023. Aksi mahasiswa tersebut berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 2.000.000 (Tobari, 2023). Kegiatan penggalangan dana juga dilakukan oleh kelompok penggemar K-pop di Indonesia yang turut melakukan penggalangan dana untuk Palestina, dan berhasil mengumpulkan lebih dari Rp1 miliar. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung sejumlah program kemanusiaan di Palestina seperti, pembangunan sekolah, pengelolaan air minum, bantuan bagi anak yatim piatu, serta bantuan berkala seperti selama bulan Ramadan (Ipol.id, 2023). Sejumlah tindakan ini menunjukkan bahwa kontribusi diplomasi kemanusiaan tidak hanya dilakukan oleh organisasi nirlaba atau pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat, komunitas, organisasi, individu dan sebagainya.

Sehubungan dengan itu, paket bantuan kemanusiaan untuk Palestina diterbangkan menuju Kairo dan digunakan untuk membantu para pengungsi Palestina yang berada di Mesir. Sebelumnya, Indonesia juga telah mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza

melalui jalur penyeberangan Rafah yang dikuasai oleh Mesir. Sebanyak lebih dari 4.400 ton bantuan kemanusiaan dari Indonesia dikirim dengan truk menuju Gaza. Indonesia terus memantau pengiriman bantuan tersebut untuk memastikan bahwa warga Palestina yang membutuhkannya benar-benar menerima bantuan tersebut. Pengiriman bantuan ke Gaza memang masih terhambat oleh blokade dari Israel. Meskipun situasi dan tensi konflik masih tinggi, pemerintah Indonesia terus berupaya agar bantuan kemanusiaan dapat diterima oleh masyarakat Palestina (Yashinta and Nasution, 2024). Selain paket bantuan berupa obat dan peralatan kesehatan, rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza Utara juga merupakan bentuk bantuan kemanusiaan lain yang sudah lebih dahulu dilakukan oleh Indonesia. Rumah sakit yang berhasil dibangun melalui bantuan dan donasi dari masyarakat Indonesia pada tahun 2011 itu kini terpaksa harus berhenti beroperasi setelah menjadi target serangan oleh Israel karena dianggap melindungi kelompok Hamas (Mazrieva, 2023).

Dari sejumlah strategi diplomasi diatas, penulis melihat Indonesia telah menggunakan diplomasi sebagai alat untuk berkomunikasi dan menegaskan posisi maupun kebijakan luar negerinya sehubungan dengan konflik Hamas-Israel kepada negara lain atau dunia internasional

secara umum. Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan beberapa hal penting yang menjadi tujuan utama dalam langkah-langkah diplomasinya. Pertama, Indonesia ingin menunjukkan konistensi dukungannya terhadap hak-hak dan kemerdekaan rakyat Palestina. Lebih lanjut, dukungan ini tidak hanya terlihat dalam pernyataan resmi pemerintah saja, namun juga dalam berbagai tindakan diplomatik yang menentang kebijakan Israel yang telah melanggar norma dan hukum internasional. Dengan langkah ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang mendukung keadilan dan hak asasi manusia pada tingkat internasional.

Kedua, Indonesia ingin menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan kebijakan luar negeri sejak masa kemerdekaan, dan merupakan amanat Konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. Prinsip Indonesia sangat jelas untuk menolak segala bentuk kolonialisme dan imperialisme. Terlebih, Indonesia memiliki sejarah cukup panjang dalam menentang kolonialisme dan imperialisme, dan ini tercermin dalam dukungannya terhadap Palestina. Indonesia menekankan pentingnya prinsip anti-kolonialisme dan menolak segala bentuk penjajahan. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, Indonesia terus menyuarakan hak-hak Palestina atas tanah dan negara

yang diakui kedaulatannya. Ketiga, Indonesia tetap kukuh pada komitmen terhadap solusi dua negara. Indonesia mendorong solusi dua negara sebagai jalan keluar yang adil dan berkelanjutan dari konflik Israel-Palestina. Solusi ini dianggap sebagai cara terbaik untuk mencapai perdamaian yang langgeng, di mana kedua negara, Israel dan Palestina, dapat hidup berdampingan dalam damai dan keamanan. Dengan mendukung solusi dua negara, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Selain menekankan dukungan kepada Palestina, solusi dua negara, dan menjalankan amanat konstitusi, Indonesia juga menegaskan posisi dan peran aktifnya pada berbagai kancah internasional. Penggunaan jalur multilateralisme di PBB dan forum internasional lainnya untuk menyuarakan dukungannya terhadap Palestina dan menentang kebijakan yang dianggap merugikan proses perdamaian, digunakan Indonesia untuk berusaha mempengaruhi opini internasional dan mendorong tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Langkah diplomasi ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berperan aktif dalam isu-isu global dan berusaha menjadi bagian dari solusi untuk konflik internasional. Dengan terlibat dalam mediasi

dan diplomasi, Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara yang peduli dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Langkah ini meningkatkan citra Indonesia di mata komunitas internasional. Terakhir, dukungan Indonesia terhadap Palestina melalui berbagai upaya diplomasi ini juga menunjukkan solidaritas Indonesia sebagai anggota dari Organisasi Kerja Sama Islam secara umum, dan solidaritas terhadap negara-negara Muslim secara khusus. Indonesia, yang merupakan bangsa dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan keberadaan Masjid al-Aqsa di Yerusalem, mempunyai keterikatan kuat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, banyak warga Indonesia yang setuju dan merasa bahwa langkah-langkah diplomasi Indonesia ini menunjukkan solidaritasnya dengan negara-negara Muslim lainnya. Ini juga semakin memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara negara-negara Muslim.

Melalui strategi dan upaya-upaya diplomasinya, Indonesia juga berpotensi untuk menyampaikan kepentingan Indonesia melalui mediator perdamaian dalam konflik Israel-Palestina. Sebagai negara yang konsisten mendukung hak-hak Palestina dan menentang penjajahan, Indonesia memiliki kepentingan untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan

melihat tercapainya perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Melalui mediator perdamaian dalam konflik Hamas-Israel seperti Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir, Indonesia dapat menyampaikan pesan-pesan penting terkait dukungan terhadap solusi dua negara dan penghentian kekerasan. Selain itu, Indonesia juga dapat menekankan betapa pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia, serta mendorong dialog yang lebih konstruktif antara Israel dan Palestina. Dengan bekerja sama dengan mediator yang memiliki pengaruh besar, Indonesia berpeluang memastikan bahwa kepentingannya dalam mendukung perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut didengar dan diperhatikan oleh komunitas internasional. Langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian global dan solidaritas dengan negara-negara Muslim lainnya.

Di tengah konflik di Gaza yang masih terus berlangsung, Indonesia senantiasa berupaya melakukan upaya-upaya diplomasi dalam menyuarkan penghentian kekerasan dan konflik Gaza serta pencapaian gencatan senjata. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan upaya-upaya diplomatik Indonesia selama ini dinilai turut berkontribusi positif dalam mendorong upaya perdamaian di Timur Tengah,

termasuk upaya gencatan senjata di Gaza. Strategi diplomasi Indonesia dalam mengupayakan perdamaian dalam konflik terbaru Hamas-Israel telah mendapat respon positif dari komunitas internasional. Banyak negara yang mengapresiasi kekonsistenan posisi Indonesia dalam isu Palestina-Israel. Sebagai contoh, pada April 2024, Indonesia mendapat apresiasi tinggi dari Duta Besar negara-negara Arab atas dukungan yang kuat Indonesia terhadap Palestina selama ini. Selain itu, menteri luar negeri Indonesia, Retno Marsudi, juga diberikan kepercayaan oleh pemimpin negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memimpin OKI dalam mengupayakan perdamaian di Palestina. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah diplomasi Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian pada konflik terbaru Hamas-Israel dipandang positif oleh dunia internasional, dan telah memungkinkan Indonesia meningkatkan citra positifnya di dunia internasional.

Upaya diplomasi Indonesia telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang penderitaan rakyat Palestina dan ketidakadilan yang mereka alami. Dukungan penuh yang diberikan Indonesia telah mendorong negara-negara lain untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam mendukung perjuangan Palestina, serta mampu mendorong dan memperkuat kerja

sama Selatan-Selatan dan mempromosikan solidaritas antar negara berkembang. Hal ini penting untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi berbagai tantangan secara bersama, termasuk konflik-konflik dan penjajahan. Selain itu, upaya diplomasi Indonesia untuk Palestina telah menyatukan segenap rakyat Indonesia dari berbagai kalangan dan memperkuat semangat mereka untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.

KESIMPULAN

Untuk mengupayakan perdamaian dalam konflik terbaru Hamas-Israel, Pemerintah Indonesia menggunakan strategi diplomasi dengan membangun komunikasi dan kerja sama dengan aktor negara sebagai upaya menyuarkan dan mencari solusi terkait konflik Hamas-Israel secara bilateral dan multilateral, *shuttle diplomacy*, dan diplomasi kemanusiaan. Konflik di Gaza masih terus berlangsung. Upaya-upaya diplomasi yang terus dilakukan Indonesia juga terus berlangsung. Selama ini upaya-upaya diplomasi Indonesia dinilai turut berkontribusi positif dalam mendorong upaya perdamaian di Timur Tengah, termasuk upaya gencatan senjata di Gaza. Kegigihan Indonesia telah membuatnya mencapai satu kepentingan terkait posisi dan citra positif Indonesia di mata dunia, yang ditandai dengan apresiasi dan

kepercayaan dunia internasional bagi Indonesia. Selain itu, diplomasi Indonesia juga telah memicu dukungan internasional terhadap Palestina. Terlebih lagi, diplomasi Indonesia telah berhasil membangkitkan semangat persatuan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan menjadi semakin kuat.

Sejauh ini, penulis melihat upaya pemerintah Indonesia yang telah melakukan diplomasi dua arah yang melibatkan aktor negara dan non-negara seperti pemerintah, LSM, masyarakat sipil, akademisi, dan aktor non-formal lainnya. Oleh karena itu, kegigihan Indonesia dalam menempuh segala bentuk alternatif solusi penyelesaian konflik Hamas dan Israel tidak boleh berhenti melainkan harus terus ditingkatkan. Selain itu, Indonesia sebaiknya terus mendorong dunia Internasional untuk sama-sama melakukan tekanan kepada Israel untuk mematuhi keputusan dari lembaga seperti *International Court of Justice (ICJ)*. Terakhir, Indonesia harus memberikan dorongan yang kuat kepada negara-negara lainnya untuk mendukung Palestina sebagai anggota penuh PBB.

REFERENSI

- Aljazeera. 2024. "Israeli Forces Storm Gaza's al-Shifa Hospital." Aljazeera.Com. March 18, 2024.
- Amnesty Internasional. 2024. "Time Is Running out for International Action to Protect Civilians and Prevent Atrocity Crimes in Rafah, as UN Security Council Resolution Is Ignored." Amnesty.Org. April 3, 2024. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/04/time-is-running-out-for-international-action-to-protect-civilians-and-prevent-atrocity-crimes-in-rafah-as-un-security-council-resolution-is-ignored/>.
- Anadolu Ajansi. 2024. "Tunjukkan Solidaritas Kemanusiaan, Diaspora Indonesia Di Turkiye Gelar Palestina Humanity Gathering Di Istanbul." Anadolu Ajansi. March 14, 2024. <https://www.aa.com.tr/id/budaya/tunjukkan-solidaritas-kemanusiaan-diaspora-indonesia-di-turkiye-gelar-palestina-humanity-gathering-di-istanbul/3164289#>.
- Anderson. 1993. *The Rise of Modern Diplomacy 1450 - 1919*. 1st ed. London: Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315844152>.
- Arab News. 2023. "UK Foreign Secretary Cameron Hosts Arab, Islamic Ministers to Discuss Israel-Hamas Conflict." Arabnews.Com. November 22, 2023. <https://arab.news/4nxqm>.
- Azharun. 2023. "Dana Donasi Palestina Terkumpul Lebih Dari Rp 27 Miliar, MUI: Mekanisme Penyaluran Melalui Jalur Resmi Pemerintah." Majelis Ulama Indonesia. November 7, 2023. <https://mui.or.id/baca/berita/dana-donasi-palestina-terkumpul-lebih-dari-rp-27-miliar-mui-mekanisme-penyaluran-melalui-jalur-resmi-pemerintah>.
- Azzahra, Nabiila. 2023. "OIC Foreign Ministers Visit Russia to Discuss Gaza." Tempo.Co. November 22, 2023. <https://en.tempo.co/read/1800011/oic-foreign-ministers-visit-russia-to-discuss-gaza>.
- Bartlett, Kate. 2024. "Tuduh Genosida Di Gaza, Afsel Gugat Israel Ke Mahkamah Internasional." Voaindonesia.Com. January 11, 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/tuduh-genosida-di-gaza-afsel-gugat-israel-ke-mahkamah-internasional/7434693.html>.

- BBC News. 2023. "Jokowi Desak Biden Untuk Dorong Israel Hentikan Serangan Ke Gaza, Tapi 'Tidak Ditanggapi.'" Bbc.Com. November 14, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz92n6mv2njo>.
- Berridge. 2022. *Diplomacy Theory and Practice*. 6th ed. Leicester: Palgrave Macmillan Cham. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-85931-2>.
- Berridge, G. R., and Alan James. 2003. *A Dictionary of Diplomacy*. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan.
- Bochtler, Lea. 2024. "Building Trust, Communication and Negotiating in the Current War Between Israel and Hamas." In *Applied Psychology Around the World*, edited by Christine Roland-Lévy, 1st ed., 6:63–71. International Association of Applied Psychology.
- BPMI Setpres. 2023a. "Bertemu PM Kishida, Presiden Jokowi Bahas Isu Bilateral Hingga Palestina Read More: <https://Setkab.Go.Id/Bertemu-Pm-Kishida-Presiden-Jokowi-Bahas-Isu-Bilateral-Hingga-Palestina/>." Setkab.Go.Id. December 16, 2023. <https://setkab.go.id/bertemu-pm-kishida-presiden-jokowi-bahas-isu-bilateral-hingga-palestina/>.
- BPMI Setpres. 2023. "Hadiri KTT ASEAN-GCC, Presiden Jokowi Sampaikan Isu Ekonomi Hingga Kemanusiaan." Setkab.Go.Id. October 20, 2023. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/indonesia-turki-akan-terus-kerja-sama-bantu-palestina/>.
- BPMI Setpres. 2023. "Indonesia-Turki Akan Terus Kerja Sama Bantu Palestina." Presidenri.Go.Id. November 12, 2023. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/indonesia-turki-akan-terus-kerja-sama-bantu-palestina/>.
- Kementerian Luar Negeri. 2023. "Presiden Jokowi Mendorong OKI Bersatu Di Garda Terdepan Hadapi Krisis Gaza." Kemlu.Go.Id. November 12, 2023. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5485/berita/presiden-jokowi-mendorong-ok-i-bersatu-di-garda-terdepan-hadapi-krisis-gaza>.
- BPMI Setpres. 2024. "Indonesia Dan Selandia Baru Sepakat Dukung Gencatan Senjata Di Palestina." Wapresri.Go.Id. February 28, 2024. <https://www.wapresri.go.id/indonesia-dan-selandia-baru-sepakat-dukung-gencatan-senjata-di-palestina/>.
- British Red Cross. 2024. "Famine Looms in Gaza: 1.1 Million Face Catastrophic Food Insecurity." Redcross.Org.Uk.

- April 5, 2024.
<https://www.redcross.org.uk/stories/disasters-and-emergencies/world/whats-happening-in-gaza-humanitarian-crisis-grows>.
c8b4fc20e4fd2ef381d5edb7e9e8308c.
- Chaterine, ahel Narda, and Krisiandi. 2023. "Di Forum PBB, Menlu Retno: Yang Terjadi Di Gaza Pelanggaran HAM Berat, Gencatan Senjata Mendesak ." Kompas.Com. December 13, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/13/12043131/di-forum-pbb-menlu-retno-yang-terjadi-di-gaza-pelanggaran-ham-berat-gencatan>.
- Christiastuti, Novi. 2024. "AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata Gaza, China Kecewa ." Detik.Com. February 21, 2024. <https://news.detik.com/internasional/d-7203711/as-veto-resolusi-dk-pbb-soal-gencatan-senjata-gaza-china-kecewa>.
- Debre, Isabel, Lederrer, and Wafaa Shuraf. 2023. "Palestinians Flee Northern Gaza after Israel Orders 1 Million to Evacuate as Ground Attack Looms." The Associated Press. October 14, 2023. <https://apnews.com/article/israel-palestinians-gaza-hamas-war>.
- Difa, Yashinta, and Raka Adji. 2023. "OIC Should Urge for Ceasefire between Israel, Palestine: Minister." Antaranews.Com. October 19, 2023. <https://en.antaranews.com/news/296577/oic-should-urge-for-ceasefire-between-israel-palestine-minister>.
- Donnelly, Jack. 2022. "Realism." In *Theories of International Relations*, edited by Richard Devetak and Jacqui True, 6th ed. London: Bloomsbury Publishing Plc.
- Haastrup, Toni. 2022. "Institutionalism." In *Theories of International Relations*, edited by Richard Devetak and Jacqui True, 6th ed. Vol. 6. London: Bloomsbury Publishing Plc.
- Ibrahim, Gibran Maulana. 2023. "Indonesia Dan Iran Sepakat Kerja Sama Bantu Palestina." Detik.Com. December 13, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-7089376/indonesia-dan-iran-sepakat-kerja-sama-bantu-palestina>.
- Ihsan, Nabil. 2024. "Menlu: Indonesia-China Perjuangkan de-Eskalasi Konflik Di Timur Tengah." Antaranews.Com. April 18, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4>

- 062882/menlu-indonesia-china-perjuangkan-de-eskalasi-konflik-di-timur-tengah.
- Integrated Food Security Phase Classification. 2023. "GAZA STRIP : IPC Acute Food Insecurity." https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Gaza_Acute_Food_Insecurity_Nov2023_Feb2024.pdf.
- Ipol.id. 2023. "Keren, Penggemar K-Pop Indonesia Aksi Gerak Cepat Galang Dana Untuk Palestina, Terkumpul Rp1 Miliar." Ipol.Id. November 6, 2023. <https://ipol.id/2023/11/keren-penggemar-k-pop-indonesia-aksi-gerak-cepat-galang-dana-untuk-palestina-terkumpul-rp1-miliar/>.
- Kementerian Luar Negeri. 2024. "KTT GNB Ke-19: Indonesia Dorong Keanggotaan Penuh Palestina Di PBB." Kemlu.Go.Id. January 20, 2024. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5696/berita/ktt-gnb-ke-19-indonesia-dorong-keanggotaan-penuh-palestina-di-pbb>.
- Kementerian Luar Negeri. 2024. "Menlu RI Perjuangkan Hak Rakyat Palestina Pada Sidang Dewan HAM PBB Ke - 55 Di Jenewa." Kemlu.Go.Id. February 29, 2024.
- Kementerian Luar Negeri. 2024. "Menlu RI Terima Penghargaan Dari Negara-Negara Arab Atas Konsistensi Dukung Palestina." Kemlu.Go.Id. April 2, 2024. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5843/berita/menlu-ri-terima-penghargaan-dari-negara-negara-arab-atas-konsistensi-dukung-palestina>.
- Kementerian Luar Negeri. 2024. "Pengiriman Bantuan Kemanusiaan Dari Indonesia: Dukungan Untuk Palestina Dan Sudan." Kemlu.Go.Id. April 3, 2024. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5849/berita/pengiriman-bantuan-kemanusiaan-dari-indonesia-dukungan-untuk-palestina-dan-sudan>.
- Kominfo. 2023. "Bertemu Raja Yordania, Presiden: Posisi Indonesia Dan Yordania Sama Soal Palestina." Kominfo.Go.Id. November 12, 2023. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/52876/bertemu-raja-yordania-presiden-posisi-indonesia-dan-yordania-sama-soal-palestina/0/berita>.
- Lederer. 2023. "UN Security Council Rejects Russia's Resolution on Gaza That Fails to Mention Hamas."

- Apnews.Com. October 17, 2023. [https://apnews.com/article/israel-
hamas-un-resolutions-russia-brazil-
c601d6aefe9d853428a485c9b60118
30.](https://apnews.com/article/israel-hamas-un-resolutions-russia-brazil-c601d6aefe9d853428a485c9b6011830)
- Mahoney, James, and Gary Goerts. 2006. "A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research." *Political Analysis* 14 (3): 227–49. [https://doi.org/10.1093/pan/mpj017.](https://doi.org/10.1093/pan/mpj017)
- Marsudi, Retno LP. 2024. "Indonesia Dan Mahkamah Internasional Mengenai Palestina." Kompas.Id. March 4, 2024. [https://app.komp.as/Ad7SPvibrxTEf1
8C8.](https://app.komp.as/Ad7SPvibrxTEf18C8)
- Mazrieva, Eva. 2023. "Indonesia 'Deeply Concerned' Over Violence Between Israel, Palestinians." Voanews.Com. October 8, 2023. [https://www.voanews.com/a/indonesi
a-deeply-concerned-over-violence-
between-israel-
palestinians/7301960.html.](https://www.voanews.com/a/indonesia-a-deeply-concerned-over-violence-between-israel-palestinians/7301960.html)
- Mazrieva, Eva. 2023. "Menlu RI: OKI Dibentuk Untuk Palestina, Sekarang Saatnya Bertindak." Voaindonesia.Com. October 19, 2023. [https://www.voaindonesia.com/a/me
nlu-ri-oki-dibentuk-untuk-palestina-
sekarang-saatnya-
bertindak/7316738.html.](https://www.voaindonesia.com/a/menlu-ri-oki-dibentuk-untuk-palestina-sekarang-saatnya-bertindak/7316738.html)
- Muhamad, Simela Victor. 2024. "Konflik Gaza Dan Diplomasi Indonesia Terkait Palestina." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 16 (2): 1–5.
- Nasional News. 2023. "Ar Rohmah Tahfizh Malang Turut Aksi Bela Palestina." Nasional.News. October 20, 2023. [https://www.nasional.news/ar-
rohmah-tahfizh-malang-turut-aksi-
bela-palestina/.](https://www.nasional.news/ar-rohmah-tahfizh-malang-turut-aksi-bela-palestina/)
- Nichols, Michelle. 2023. "Russia, China Veto US Push for UN Action on Israel, Gaza ." Reuters.Com. October 26, 2023. [https://www.reuters.com/world/un-
security-council-vote-rival-us-
russian-plans-israel-gaza-action-
2023-10-25/.](https://www.reuters.com/world/un-security-council-vote-rival-us-russian-plans-israel-gaza-action-2023-10-25/)
- Nugraha, Tian Adhia, and Audry Maura. 2023. "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi 'Keamanan Manusia' Di Palestina." *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 8 (2): 81–106.
- Pemerintah Kota Tangerang. 2023. "Peduli Palestina, SDIT Cordova 4 Kota Tangerang Berhasil Galang Dana Kemanusiaan Hingga 40 Juta." Smartcity.Tangerangkota.Go.Id.

- October 26, 2023.
<https://smartcity.tangerangkota.go.id/dimensi/kategori/detail/peduli-palestina-sdit-cordova-4-kota-tangerang-berhasil-galang-dana-kemanusiaan-hingga-40-juta>.
- Pietromarchi, Virginia, Nils Adler, and Farah Najjar. 2024. "Israel's War on Gaza Updates: US Vetoes Palestine Bid for UN Membership." *Aljazeera.Com*. April 18, 2024.
<https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/4/18/israels-war-on-gaza-live-children-among-7-killed-as-israeli-strikes-rafah?update=2844315>.
- Pramudyani, Yashinta Difa. 2024. "Bertemu Menlu Belanda, Retno Bahas Ekonomi Hingga Palestina." *Antaraneews.Com*. February 1, 2024.
<https://www.antaraneews.com/berita/3941961/bertemu-menlu-belanda-retno-bahas-ekonomi-hingga-palestina>.
- Purnama, Basuki Eka. 2023. "Menlu OKI Desak Prancis Dukung Penyelesaian Krisis Di Jalur Gaza." *Mediaindonesia.Com*. November 24, 2023.
<https://mediaindonesia.com/internasional/632120/menlu-oki-desak-prancis-dukung-penyelesaian-krisis-di-jalur-gaza>.
- Ranggasari, Ririe. 2023. "Israel Bombs Indonesian Hospital in Gaza Hours before Truce." *Tempo.Co*. November 24, 2023.
<https://en.tempo.co/read/1800914/israel-bombs-indonesian-hospital-in-gaza-hours-before-truce>.
- Saaida, Mohammed. 2023. "The Four Core Principles of Diplomacy." *Science For All Publications* 1 (1): 1–12.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841192>.
- Sabangkota. 2023. "Masyarakat Gaungkan Aksi Solidaritas Untuk Palestina Dari Ujung Barat Indonesia." *Sabangkota.Go.Id*. October 27, 2023.
<https://www.sabangkota.go.id/berita/kategori/kegiatan-walikota/masyarakat-gaungkan-aksi-solidaritas-untuk-palestina-dari-ujung-barat-indonesia>.
- Salim, Yuni. 2023. "Sidang Majelis Umum PBB Soal Konflik Israel-Hamas Di Tengah Kebuntuan Di Dewan Keamanan." *Voaindonesia.Com*. October 27, 2023.
<https://www.voaindonesia.com/a/sidang-majelis-umum-pbb-soal-konflik>.

- israel-hamas-di-tengah-kebuntuan-di-dewan-keamanan/7329278.html.
- Tian, Yew Lun, and Laurie Chen. 2023. "In Beijing, Arab and Muslim Ministers Urge End to Gaza War." Reuters.Com. November 20, 2023. <https://www.reuters.com/world/middle-east/beijing-arab-muslim-ministers-urge-end-gaza-war-2023-11-20/>.
- Tobari. 2023. "Mahasiswa ITS Mandiri Gelar Aksi Penggalangan Dana Untuk Palestina." Infopublik.Id. November 15, 2023. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/797796/mahasiswa-its-mandiri-gelar-aksi-penggalangan-dana-untuk-palestina#>.
- UK Parliament. 2024. "2023/24 Israel-Hamas Conflict: UK and International Response." <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9874/CBP-9874.pdf>.
- UNRWA. 2023. "UNRWA Situation Report #35 On The Situation In The Gaza Strip and The West Bank, Including East Jerusalem." United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. November 22, 2023. https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_gaza_sitrep_35_nov_22_2023_eng.pdf.
- Watson, Adam. 1982. *Diplomacy: The Dialogue Between States*. 1st ed. London: Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203698440>.
- Yashinta, and Rahmad Nasution. 2024. "Aid to Palestine, Sudan Reflects RI's Humanitarian Diplomacy: Marsudi." Antaranews.Com. April 3, 2024. <https://en.antaranews.com/news/309972/aid-to-palestine-sudan-reflects-ris-humanitarian-diplomacy-marsudi>.
- Hubungan Internasional, 3(2), pp. 142–148.
- Till, G. (2009) *Seapower: A guide for the twenty-first century*. 2nd edn. London: Routledge.
- Yadav, A. S., 2022. *Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.